

**EVALUASI PROGRAM PENGENDALIAN SAMPAH PLASTIK PADA
PELAKU USAHA UMKM DI KELURAHAN BULUSAN KECAMATAN
TEMBALANG KOTA SEMARANG**

Meliana Fandi Dharmega, Kismartini Kismartini

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405**

Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id>

Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Plastic Use Control Program, implemented based on Semarang Mayor Regulation Number 27 of 2019 concerning Plastic Use Control, aims to reduce the use of single-use plastics and encourage the adoption of environmentally friendly alternatives. However, the use of single-use plastics and styrofoam remains common among MSMEs in Bulusan Village. This study aimed to evaluate the implementation of the program and identify the factors that hinder its implementation. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation. The study applied the CIPP evaluation model combined with Outcome indicators to evaluate the program. The findings indicate that the program has not yet achieved its intended objectives. Most MSME actors continue to rely on single-use plastics and styrofoam due to their affordability, practicality, and the limited availability of suitable environmentally friendly alternatives. Furthermore, limitations in facilities and infrastructure, budget allocation, human resources, and monitoring activities have reduced the effectiveness of the program. Consequently, sustainable behavioral change among MSME actors has not yet been fully achieved. Strengthening inter-agency collaboration, improving monitoring mechanisms, and expanding access to affordable environmentally friendly packaging are therefore necessary to enhance the effectiveness of the program.

Keywords: Program Evaluation, Plastic Use Control, MSMEs, CIPP

PENDAHULUAN

Sampah sudah menjadi isu lingkungan krusial yang terus menerus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Di Indonesia, tantangan tersebut diperburuk dengan fakta bahwa sebagian besar sampah belum dikelola secara optimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pada konteks perkotaan, plastik jadi salah satu komponen penyumbang polusi terbesar yang sulit terurai secara alami dan berpotensi menimbulkan emisi berbahaya jika dibakar secara tradisional.

Fenomena tersebut tak luput dari Provinsi Jawa Tengah, terkhusus Kota Semarang.

Tabel 1. Volume Timbulan Sampah Kota Semarang Tahun 2020-2024

Tahun	Timbulan Sampah Harian (ton)	Timbulan Sampah Tahunan (ton)
2020	1,276.74	466,010.79
2021	1,180.14	430,749.75
2022	1,181.06	431,085.22
2023	1,182.29	431,534.65
2024	1,189.71	434,243.97

Sumber: *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional*, 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2024, produksi sampah harian di Kota Semarang mencapai 1,18 ribu ton atau sekitar 434,24 ribu ton per tahun (SIPSN, 2025). Adapun porsi terbesar timbulan tersebut berasal dari sampah

rumah tangga dan plastik sekali pakai. Pemerintah Kota Semarang sudah berupaya merespons tantangan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik yang secara spesifik melarang penyediaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* di sektor ritel *modern*, pusat perbelanjaan, dan juga restoran.

Namun, efektifitas regulasi ini masih menghadapi kendala di lapangan, khususnya di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan aktivitas ekonomi UMKM yang masif seperti Kecamatan Tembalang. Kelurahan Bulusan yang merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Tembalang, memperlihatkan tren penggunaan kemasan plastik dan *styrofoam* yang masih marak dalam kegiatan operasional usaha pelaku UMKM, terutama pada sektor kuliner. Fenomena tersebut diperparah dengan meningkatnya gaya hidup konsumsi *online* melalui *platform* seperti GoFood.

Permasalahan pengelolaan sampah di wilayah ini menjadi semakin kompleks karena keterbatasan infrastruktur pendukung. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kecamatan Tembalang tercatat sering mengalami

kelebihan kapasitas (*overload*), sementara inisiatif seperti bank sampah masih menghadapi hambatan berupa distribusi yang tidak merata di tingkat Rukun Warga (RW) juga partisipasi masyarakat yang belum optimal. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya celah antara kebijakan yang ditetapkan dengan realitas implementasi di tingkat akar rumput.

Untuk menelaah permasalahan tersebut secara komprehensif, penelitian ini menggunakan Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (1996), serta dikombinasikan dengan indikator *Outcomes* dari Bridgman dan Davis (2000). Pendekatan tersebut dipilih untuk mengevaluasi secara mendalam pelaksanaan program pengendalian penggunaan plastik pada pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program pengendalian penggunaan plastik pada pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan, serta mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

a. Evaluasi Kebijakan Publik

Kebijakan dapat dipahami sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu. Menurut Kismartini dan Yusuf (2023), kebijakan publik dibuat dalam rangka untuk memecahkan masalah untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan.

Stufflebeam (1966, dalam Musringudin *et al.*, 2022) menyatakan terdapat empat model untuk mengevaluasi program yang masing-masing diperuntukkan bagi setiap keputusan, yaitu:

1) *Context Evaluation:* Evaluasi konteks bertujuan untuk menggambarkan dan merinci kondisi lingkungan tempat program dijalankan, termasuk latar belakang yang memengaruhi perumusan tujuan dan strategi program, aspek legalitas, dukungan dari lingkungan sekitar, karakteristik populasi sasaran, serta tujuan yang ingin dicapai oleh program tersebut.

2) *Input Evaluation:* Evaluasi *input* bertujuan untuk mengetahui berbagai hal yang tersedia untuk menunjang pencapaian tujuan program, seperti sumber daya

manusia, anggaran, hingga sarana dan prasarana.

3) *Process Evaluation:* Evaluasi proses bertujuan memberikan informasi mengenai pelaksanaan program di lapangan, termasuk memantau apakah prosedur dan strategi yang diterapkan sudah berjalan sesuai rencana, apakah pelaksanaannya selaras dengan tujuan yang ingin dicapai, serta apakah program tersebut telah mempertimbangkan karakteristik dari kelompok sasaran.

4) *Product Evaluation:* Evaluasi produk atau hasil bertujuan untuk mengukur, menganalisis, dan menilai sejauh mana hasil atau pencapaian program telah terealisasi. Selain itu, evaluasi produk atau hasil juga membantu menentukan apakah strategi, prosedur, atau metode yang telah diterapkan perlu dihentikan, disesuaikan, atau dilanjutkan dalam bentuk yang sama.

Namun, model tersebut belum secara spesifik menekankan pada analisis dampak program terhadap kelompok sasaran. Oleh karena itu, penelitian ini juga menggunakan Model Evaluasi yang

dikembangkan oleh Bridgman dan Davis (2000, dalam Badjuri dan Yuwono, 2002), yakni:

1) *Outcomes:* Evaluasi dampak digunakan untuk mengevaluasi pengaruh yang dirasakan oleh masyarakat luas atau kelompok yang dipengaruhi oleh kebijakan. Indikator tersebut mencakup analisis terhadap konsekuensi atau akibat yang timbul dari implementasi program.

b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Pengendalian Penggunaan Plastik

Keberhasilan pelaksanaan suatu program sering kali tertahan oleh berbagai tantangan yang bersifat destruktif di tingkat lapangan. Sebagai sebuah intervensi, program dapat mengalami distorsi dan gagal mencapai hasil yang optimal apabila dihadapkan dengan faktor penghambat yang signifikan.

Adapun Wirawan (2012) dalam “Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi” serta Korten (1980, dalam Nandini *et al.*, 2022) menyatakan bahwa keberhasilan suatu program dipengaruhi oleh:

1) Tingkat Kesadaran dan Sikap:

Merupakan faktor yang berkaitan dengan pemahaman, persepsi, serta kecenderungan perilaku individu atau kelompok terhadap suatu kebijakan atau program. Kesadaran yang tinggi akan mendorong penerimaan dan kepatuhan terhadap kebijakan, sedangkan sikap yang positif dapat meningkatkan kemauan untuk mengubah perilaku sesuai dengan tujuan program.

2) Efektivitas Koordinasi

Antarlembaga: Merupakan tingkat keberhasilan kerja sama, komunikasi, dan sinkronisasi antarorganisasi atau instansi yang terlibat dalam pelaksanaan suatu program. Koordinasi yang efektif memungkinkan pembagian tugas, penyelarasan tujuan, serta pelaksanaan program yang lebih terintegrasi sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan kebijakan.

3) Kesesuaian Program dengan

Kondisi Sasaran: Kesesuaian program dengan kondisi sasaran merupakan tingkat kecocokan antara desain, bentuk kegiatan, maupun strategi pelaksanaan program

dengan karakteristik, kebutuhan, serta kemampuan kelompok sasaran. Program yang sesuai dengan kondisi sasaran akan lebih mudah diterima, diimplementasikan, dan memberikan hasil yang diharapkan.

METODE PENULISAN

Berdasarkan uraian tersebut, desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan lokasi di sektor UMKM di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan dilakukan menggunakan *purposive sampling*. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat (*key person*) dalam pelaksanaan Program Pengendalian Penggunaan Plastik, yakni pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Bulusan, pengelola Bank Sampah Tulip, Aparatur Kelurahan Bulusan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan pengumpulan data, kondensasi data, dan penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Pelaksanaan Program Pengendalian Penggunaan Plastik Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 pada Pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan

a. Evaluasi *Input*

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Bulusan, evaluasi pada dimensi *input* menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya program belum memadai untuk mendukung pelaksanaan Program Pengendalian Penggunaan Plastik. Keterbatasan tersebut terlihat pada aspek sarana dan prasarana, alokasi anggaran, kelembagaan, serta sumber daya manusia yang saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas implementasi program.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan Program Pengendalian Penggunaan Plastik di Kelurahan Bulusan masih belum memadai. Salah satu kendala yang dihadapi adalah distribusi kantong pilah sampah (*tote bag*) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang belum merata sehingga belum

menjangkau seluruh kelompok sasaran. Keterbatasan sarana juga tercermin dari kondisi armada truk pengangkut sampah yang tetap dioperasikan meskipun sekitar 170 unit atau sekitar 40% dari total armada di Kota Semarang mengalami kerusakan. Selain itu, pengelola Bank Sampah Tulip menghadapi keterbatasan lahan karena kegiatan operasional masih memanfaatkan balai pertemuan yang kapasitasnya belum mampu mengakomodasi kebutuhan pengelolaan bank sampah secara optimal.

Pada aspek anggaran, hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan alokasi pendanaan dalam pelaksanaan program. Sebagian besar anggaran dialokasikan pada sub kegiatan penanganan sampah melalui pengangkutan, yaitu sebesar Rp50,4 miliar atau lebih dari 60% dari total anggaran program. Sebaliknya, unit pelaksana di tingkat masyarakat, seperti Bank Sampah Tulip, hanya memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta dari organisasi PKK yang penggunaannya masih harus dibagi untuk berbagai kegiatan lingkungan lainnya. Komposisi anggaran tersebut menunjukkan bahwa prioritas pemerintah daerah masih berorientasi pada penanganan sampah di hilir

dibandingkan penguatan upaya pengurangan sampah dari sumber melalui pembinaan masyarakat dan pelaku UMKM.

Selanjutnya, aspek kelembagaan juga menunjukkan adanya kelemahan dalam penegakan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha belum dilaksanakan secara konsisten. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mengakui bahwa penegakan sanksi selama ini lebih difokuskan pada sektor ritel *modern* dan usaha berskala besar, sedangkan pelaku UMKM belum menjadi prioritas dalam penerapan sanksi administratif. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum tersedianya alternatif kemasan ramah lingkungan yang dinilai sesuai dengan kebutuhan operasional UMKM, sehingga pemerintah daerah masih mengedepankan pendekatan persuasif melalui pembinaan dan sosialisasi.

Selain itu, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang hanya memiliki 10 personel yang bertugas melakukan pembinaan terhadap bank sampah di seluruh wilayah Kota

Semarang, sementara di tingkat Kelurahan Bulusan belum tersedia petugas khusus yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program. Keterbatasan jumlah personel tersebut menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara langsung dan berkelanjutan. Akibatnya, proses *monitoring* lebih banyak bergantung pada pelaporan administratif melalui aplikasi *SIM PKK* dibandingkan pengawasan lapangan yang mampu menggambarkan kondisi implementasi program secara nyata.

Secara keseluruhan, temuan pada dimensi *input* menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan Program Pengendalian Penggunaan Plastik di Kelurahan Bulusan. Menurut Stufflebeam (1966, dalam Musringudin *et al.*, 2022), evaluasi *input* bertujuan menilai kecukupan sumber daya, strategi, dan kapasitas organisasi dalam mendukung pencapaian tujuan program. Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan sarana dan prasarana, ketimpangan alokasi anggaran, lemahnya penegakan kelembagaan, serta terbatasnya sumber daya manusia menunjukkan bahwa komponen *input*

Program Pengendalian Penggunaan Plastik belum memadai sehingga memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pada tahap berikutnya.

b. Evaluasi *Process*

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Bulusan, evaluasi pada dimensi *process* menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pengendalian Penggunaan Plastik belum berjalan secara optimal. Berbagai kendala ditemukan pada aspek pendampingan, pelibatan pelaku UMKM, pelaksanaan sosialisasi, koordinasi antarinstansi, serta mekanisme pengawasan sehingga menghambat pencapaian tujuan program.

Salah satu temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendampingan yang dilakukan pemerintah daerah belum berjalan secara optimal. Pendampingan yang diberikan kepada masyarakat dan pelaku UMKM masih terbatas pada penyampaian informasi umum mengenai pengelolaan sampah dan belum disertai pembinaan yang berkelanjutan terkait pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Selain itu, mekanisme bank sampah juga belum mampu memberikan nilai ekonomi yang menarik bagi masyarakat karena harga

beli sampah relatif rendah dibandingkan dengan pengepul, sehingga minat masyarakat dan pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam kegiatan bank sampah masih terbatas.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pelibatan pelaku UMKM dalam Program Pengendalian Penggunaan Plastik masih belum optimal. Sebagian besar kegiatan program masih berfokus pada kelompok masyarakat dan kader lingkungan, sedangkan pelaku UMKM, khususnya pelaku usaha pendatang di Kelurahan Bulusan, belum terintegrasi secara sistematis dalam kegiatan sosialisasi, pembinaan, maupun mekanisme pengawasan. Selain itu, belum terdapat strategi pelaksanaan yang membedakan pendekatan kepada rumah tangga dengan pendekatan kepada pelaku UMKM, meskipun kedua kelompok tersebut memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda.

Pada aspek sosialisasi, pelaksanaan Program Pengendalian Penggunaan Plastik juga menghadapi keterbatasan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang menerapkan sistem rotasi penyuluhan antarwilayah sehingga kegiatan sosialisasi tatap muka hanya dapat dilaksanakan sebanyak 16 kali

dalam satu tahun. Keterbatasan tersebut menyebabkan intensitas edukasi dan pendampingan di Kelurahan Bulusan menjadi relatif rendah. Di samping itu, materi sosialisasi masih didominasi oleh pembahasan mengenai pengelolaan sampah secara umum dan belum secara khusus memberikan edukasi mengenai pengendalian penggunaan plastik sekali pakai sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019.

Selain itu, koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program juga belum berjalan secara optimal. Meskipun Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, pemerintah kelurahan, dan pengelola bank sampah telah menjalankan perannya masing-masing, koordinasi dalam pembinaan, *monitoring*, dan pengawasan terhadap pelaku UMKM masih belum terintegrasi. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan program belum mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata.

Secara keseluruhan, temuan pada dimensi *process* menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pengendalian Penggunaan Plastik masih menghadapi berbagai kendala pada tahap implementasi. Keterbatasan

pendampingan, belum optimalnya pelibatan pelaku UMKM, rendahnya intensitas sosialisasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum konsistennya penerapan sanksi menyebabkan implementasi program belum berjalan secara efektif. Menurut Stufflebeam (1966, dalam Musringudin *et al.*, 2022), evaluasi *process* bertujuan menilai pelaksanaan program untuk mengetahui apakah kegiatan telah dijalankan sesuai dengan rencana dan mampu mendukung pencapaian tujuan program. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program Pengendalian Penggunaan Plastik di Kelurahan Bulusan belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sehingga berbagai kelemahan pada tahap implementasi tersebut turut memengaruhi capaian *product* dan *outcomes* program.

c. Evaluasi *Product*

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Bulusan, evaluasi pada dimensi *product* menunjukkan bahwa Program Pengendalian Penggunaan Plastik belum mencapai hasil yang diharapkan. Hal tersebut ditunjukkan oleh masih tingginya penggunaan plastik sekali pakai dan *styrofoam* oleh pelaku

UMKM, rendahnya keterlibatan pelaku UMKM dalam kegiatan bank sampah, serta belum terbentuknya perubahan perilaku yang berkelanjutan dalam penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih memilih menggunakan plastik sekali pakai dan *styrofoam* karena dinilai lebih murah, praktis, mudah diperoleh, serta sesuai dengan kebutuhan operasional usaha. Di sisi lain, alternatif kemasan ramah lingkungan masih memiliki harga yang relatif lebih tinggi sehingga belum menjadi pilihan utama bagi pelaku UMKM.

Selain itu, mekanisme *monitoring* yang dilakukan melalui aplikasi *SIM PKK* belum mampu memberikan gambaran nyata mengenai capaian Program Pengendalian Penggunaan Plastik pada sektor UMKM. *Monitoring* yang dilakukan masih bersifat administratif dan belum didukung oleh indikator maupun target pengurangan penggunaan plastik sekali pakai yang terukur pada tingkat pelaku usaha. Akibatnya, pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menilai

tingkat keberhasilan program secara objektif.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa keberadaan bank sampah belum mampu berfungsi sebagai sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi bagi pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan. Pemanfaatan bank sampah masih didominasi oleh masyarakat sekitar, sedangkan partisipasi pelaku UMKM dalam kegiatan pemilahan maupun penyeteroran sampah masih sangat terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat program belum menjangkau seluruh kelompok sasaran sebagaimana diharapkan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pengendalian Penggunaan Plastik belum mampu mencapai tujuan kebijakan secara optimal. Ditinjau berdasarkan Model Evaluasi CIPP, dimensi *product* menekankan pada pencapaian hasil dan manfaat program. Berdasarkan temuan penelitian, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tujuan program untuk mendorong pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan membentuk perubahan perilaku pelaku UMKM belum tercapai secara optimal. Dengan demikian, efektivitas Program

Pengendalian Penggunaan Plastik pada pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan masih perlu ditingkatkan melalui penguatan implementasi pada aspek *input* dan *process*.

d. Evaluasi Outcomes

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Bulusan, evaluasi pada dimensi *outcomes* menunjukkan bahwa Program Pengendalian Penggunaan Plastik belum mampu menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan pada pelaku UMKM sebagai kelompok sasaran. Sebagian besar pelaku UMKM masih menggunakan plastik sekali pakai dan *styrofoam* dalam kegiatan usahanya karena dinilai lebih praktis, ekonomis, dan mudah diperoleh dibandingkan kemasan ramah lingkungan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kepatuhan pelaku UMKM terhadap upaya pengurangan penggunaan plastik masih lebih banyak dipengaruhi oleh kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan pemerintah dibandingkan oleh kesadaran yang tumbuh dari diri pelaku usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan program untuk membangun perubahan perilaku belum sepenuhnya tercapai, karena praktik penggunaan kemasan

ramah lingkungan belum menjadi kebiasaan yang dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan.

Selain itu, rendahnya partisipasi pelaku UMKM dalam kegiatan bank sampah serta belum optimalnya *monitoring* dan pembinaan menyebabkan dampak program belum dirasakan secara luas oleh kelompok sasaran. Akibatnya, manfaat Program Pengendalian Penggunaan Plastik masih terbatas pada sebagian masyarakat dan belum mampu mendorong perubahan perilaku secara kolektif di lingkungan pelaku UMKM Kelurahan Bulusan.

Menurut Bridgman dan Davis (2000, dalam Badjuri dan Yuwono, 2002), keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan atau tercapainya keluaran program, tetapi juga dari kemampuan kebijakan tersebut menghasilkan perubahan yang nyata terhadap kelompok sasaran. Berdasarkan temuan penelitian, Program Pengendalian Penggunaan Plastik belum mampu menghasilkan *outcomes* yang optimal karena perubahan perilaku pelaku UMKM dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai belum terbentuk secara berkelanjutan. Dengan demikian, dampak kebijakan terhadap

penyelesaian permasalahan penggunaan plastik pada sektor UMKM di Kelurahan Bulusan masih belum tercapai secara optimal.

Faktor Penghambat Keberhasilan Program Pengendalian Penggunaan Plastik Pengendalian Sampah Plastik pada Pelaku Usaha UMKM di Kelurahan Bulusan

a. Tingkat Kesadaran dan Sikap

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kesadaran dan sikap pelaku UMKM menjadi salah satu faktor yang menghambat keberhasilan Program Pengendalian Penggunaan Plastik di Kelurahan Bulusan. Sebagian besar pelaku UMKM masih memprioritaskan efisiensi biaya operasional dan keuntungan usaha dibandingkan upaya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Penggunaan plastik dan *styrofoam* dipandang sebagai pilihan yang paling praktis, mudah diperoleh, serta mampu menjaga harga produk tetap terjangkau, khususnya bagi konsumen yang didominasi oleh mahasiswa.

Selain pertimbangan ekonomi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku UMKM yang belum mengetahui adanya Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun

2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik maupun berbagai upaya pemerintah dalam mengendalikan penggunaan plastik sekali pakai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada kelompok sasaran belum menjangkau seluruh pelaku UMKM, terutama pelaku usaha yang baru beroperasi di Kelurahan Bulusan.

Rendahnya tingkat pengetahuan tersebut berdampak pada belum terbentuknya kesadaran untuk beralih menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Akibatnya, sebagian besar pelaku UMKM masih mempertahankan penggunaan plastik sekali pakai dan *styrofoam* dalam kegiatan usahanya sehingga tujuan Program Pengendalian Penggunaan Plastik untuk mendorong perubahan perilaku belum dapat tercapai secara optimal.

b. Efektivitas Koordinasi Antarlembaga

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas koordinasi antarlembaga menjadi salah satu faktor yang menghambat keberhasilan Program Pengendalian Penggunaan Plastik di Kelurahan Bulusan. Koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota

Semarang, Pemerintah Kelurahan Bulusan, dan pengelola Bank Sampah Tulip telah berlangsung, namun belum terintegrasi secara optimal dalam pelaksanaan program. Hal tersebut terlihat dari belum adanya mekanisme koordinasi yang mampu menjangkau seluruh pelaku UMKM secara berkelanjutan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa komunikasi antarinstansi masih didominasi oleh penyampaian informasi dari pemerintah kepada pelaksana di tingkat kelurahan tanpa diikuti mekanisme umpan balik yang efektif. Akibatnya, berbagai kendala yang dihadapi di tingkat pelaksana, seperti rendahnya partisipasi pelaku UMKM dan keterbatasan pelaksanaan sosialisasi, belum sepenuhnya menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan pelaksanaan program.

Selain itu, pembagian tugas dan kewenangan antarinstansi belum sepenuhnya mendukung efektivitas implementasi kebijakan. Pemerintah Kelurahan Bulusan berperan dalam pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat, namun belum memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan ketentuan terhadap pelaku

UMKM yang masih menggunakan plastik sekali pakai dan *styrofoam*. Di sisi lain, mekanisme evaluasi pelaksanaan program masih lebih berorientasi pada pemenuhan pelaporan administratif melalui aplikasi *SIM PKK* dibandingkan *monitoring* lapangan terhadap pencapaian tujuan program.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan Program Pengendalian Penggunaan Plastik masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek komunikasi, pembagian peran, *monitoring*, dan tindak lanjut hasil evaluasi. Dengan koordinasi yang lebih efektif, pelaksanaan program diharapkan mampu menjangkau kelompok sasaran secara lebih optimal serta mendukung tercapainya tujuan pengendalian penggunaan plastik pada pelaku UMKM.

c. Kesesuaian Program dengan Kondisi Sasaran

Berdasarkan hasil penelitian, kesesuaian Program Pengendalian Penggunaan Plastik dengan kondisi sasaran masih menjadi salah satu faktor yang menghambat keberhasilan program pada pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan. Program pengendalian penggunaan plastik belum sepenuhnya

mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan pelaku UMKM, khususnya yang bergerak di sektor *food and beverages* (FnB), yang masih sangat bergantung pada penggunaan plastik sekali pakai dan *styrofoam* sebagai kemasan produk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih mempertahankan penggunaan plastik sekali pakai dan *styrofoam* karena dinilai lebih praktis, ekonomis, serta mudah diperoleh dibandingkan kemasan ramah lingkungan. Di sisi lain, alternatif kemasan yang tersedia di pasaran masih memiliki harga yang relatif lebih tinggi sehingga belum sesuai dengan kemampuan operasional sebagian besar pelaku UMKM. Selain itu, keterbatasan informasi dan pendampingan mengenai pilihan kemasan yang ramah lingkungan juga menyebabkan pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam melakukan perubahan praktik usahanya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pengendalian Penggunaan Plastik belum sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas kelompok sasaran. Akibatnya, tujuan program untuk mendorong pengurangan penggunaan plastik sekali

pakai pada pelaku UMKM belum dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan program perlu mempertimbangkan karakteristik usaha, kemampuan ekonomi, serta kebutuhan pelaku UMKM agar kebijakan yang diterapkan lebih mudah diimplementasikan dan memperoleh dukungan dari kelompok sasaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Program Pengendalian Penggunaan Plastik berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 pada pelaku UMKM di Kelurahan Bulusan belum mencapai tujuan secara optimal. Hasil evaluasi menggunakan model CIPP menunjukkan bahwa pada dimensi *input*, pelaksanaan program masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, ketimpangan alokasi anggaran yang lebih berorientasi pada penanganan sampah di hilir, belum optimalnya penegakan kebijakan, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Pada dimensi *process*, pelaksanaan program belum berjalan secara optimal karena pendampingan, sosialisasi, pelibatan pelaku UMKM, koordinasi

antarlembaga, serta mekanisme pengawasan belum mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran secara efektif. Pada dimensi *product*, pelaksanaan program belum mampu meningkatkan partisipasi pelaku UMKM dalam penggunaan kemasan ramah lingkungan maupun pengelolaan sampah melalui bank sampah secara optimal. Sementara itu, pada dimensi *outcomes*, program belum mampu mendorong perubahan perilaku pelaku UMKM secara berkelanjutan karena sebagian besar pelaku usaha masih menggunakan plastik sekali pakai dan *styrofoam* dalam kegiatan usahanya.

Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan Program Pengendalian Penggunaan Plastik meliputi tingkat kesadaran dan sikap pelaku UMKM yang masih rendah terhadap pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, belum optimalnya efektivitas koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan program, serta belum sesuainya pelaksanaan program dengan kondisi dan kebutuhan pelaku UMKM sebagai kelompok sasaran. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan program untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai pada sektor UMKM di Kelurahan

Bulusan belum dapat tercapai secara optimal sehingga diperlukan penguatan pembinaan, koordinasi, *monitoring*, serta penyesuaian strategi pelaksanaan program dengan karakteristik pelaku UMKM.

SARAN

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang perlu memperkuat kerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam pelaksanaan sosialisasi Program Pengendalian Penggunaan Plastik. Sosialisasi tidak hanya ditujukan kepada masyarakat secara umum, tetapi perlu secara khusus menyasar pelaku UMKM sebagai kelompok sasaran utama program.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang perlu melakukan penataan prioritas anggaran dengan meningkatkan alokasi pada pengadaan dan pembaruan aset pendukung pengelolaan sampah.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang bersama aparaturnya perlu memperkuat mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku UMKM melalui sistem *monitoring* yang lebih terstruktur.

4. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang perlu menetapkan target capaian Program Pengendalian Penggunaan Plastik yang lebih terukur pada sektor UMKM, seperti peningkatan jumlah pelaku usaha yang menggunakan kemasan ramah lingkungan, peningkatan partisipasi dalam kegiatan bank sampah, maupun pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dalam kegiatan usaha
5. Pemerintah Kota Semarang perlu memperkuat peran sebagai fasilitator dalam mendorong penggunaan kemasan ramah lingkungan pada sektor UMKM melalui kerja sama dengan produsen atau distributor kemasan ramah lingkungan. Kerja sama tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk penyediaan informasi mengenai penyedia kemasan, penyelenggaraan temu usaha (*business matching*), maupun pendampingan kepada pelaku UMKM dalam memilih kemasan yang sesuai dengan karakteristik usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

Ambiyar, & Muharika, D. (2019). *Metodologi penelitian evaluasi program*. Bandung: Alfabeta.

Arikunto, S. (2016). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. (2025). *Catatan Berita April 2025*. Dalam <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2025/05/37.-CB-April-2025.pdf>. Diunduh pada tanggal 15 Januari 2026.

Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2024). *Kecamatan Tembalang Dalam Angka 2024*. Dalam <https://semarangkota.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/39ef57c23511add2a2c04368/kecamatan-tembalang-dalam-angka-2024.html>. Diunduh pada tanggal 14 Maret 2025.

Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2025). *Kecamatan Tembalang dalam Angka 2025*. Dalam <https://semarangkota.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/c4a40915d869bcb3e36b51aa/kecamatan-tembalang-dalam-angka-2025.html>. Diunduh pada tanggal 1 Desember 2025.

Badjuri, A., & Yuwono, T. (2002). *Kebijakan publik: Konsep dan strategi*. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. (2026). *Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang*. Dalam <https://www.dlh.semarangkota.go.id/halaman/struktur-organisasi-ixj1ay2i2u>. Diunduh pada tanggal 1 Desember 2025.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2025). *Data timbulan sampah Kota*

- Semarang tahun 2020–2024. Dalam <https://sampahnasional.kemenvh.go.id/indikatif/public/data/timbangan>. Diunduh pada tanggal 4 Maret 2025.
- Kismartini, & Yusuf, I. M. (2023). *Buku ajar pengantar metode penelitian administrasi publik*. Yogyakarta: Deepublish
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2025). *Komposisi sampah nasional berdasarkan sumber sampah*. Dalam <https://sampahnasional.kemenvh.go.id/indikatif/public/data/komposisi>. Diunduh pada tanggal 4 Maret 2025.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Newbury Park, CA: SAGE Publications
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Musingudin, M. (2022). *Administrasi dan manajemen pendidikan sekolah*. Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.,
- Nandini, A. R., Putri, A. R., Amal, I., Jamil, S. N. A., & Fuad, S. F. (2022). Evaluasi program penanganan sampah Pemerintah Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3(2), 378–390.
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi data dalam analisis data kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833.
- Pawestri, P., & Fauzan, I. I. (2026). Modal sosial terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah melalui pendekatan teori Putnam. *Journal of Communication Education Insan Pembangunan (JOCE-IP)*, 20(1), 55–60.
- Permana, A. A., & Astuti, P. (2022). Analisis implementasi pengelolaan dan pengendalian sampah plastik di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(3), 365–379.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi: Teori, proses, dan studi kasus komparatif*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Wirawan. (2012). *Evaluasi: Teori, model, standar, aplikasi, dan profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.